

# Brief Note

Maret 2026

Penulis

**Nur Hadi Wiyono**  
[nhwiyono@gmail.com](mailto:nhwiyono@gmail.com)

Editor

**Ratna Indrayanti**  
[ratna.indrayanti@gmail.com](mailto:ratna.indrayanti@gmail.com)

## Mengelola Migrasi di Jakarta menuju Kota Global

### Ringkasan

*Brief Note* ini mengkaji pengelolaan migrasi di Jakarta dalam konteks perubahan status menjadi Daerah Khusus Jakarta dan ambisinya sebagai kota global. Meski tidak lagi berstatus ibu kota negara, Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian nasional dan simpul jejaring global, sehingga terus menarik arus migrasi dari berbagai daerah.

Analisis migrasi risen menunjukkan tren penurunan jangka panjang sejak puncaknya pada 1980–1990-an. Hal ini mencerminkan berkurangnya daya tarik Jakarta sebagai tempat tinggal permanen akibat mahalnya biaya hidup dan meningkatnya tekanan perkotaan, serta berkembangnya wilayah penyangga Jabodetabek. Pada periode terkini, migrasi masuk dan keluar cenderung berimbang, menandakan pergeseran ke arah migrasi sirkuler dan meningkatnya peran komuter. Mobilitas harian jutaan komuter usia produktif menjadi tantangan utama, terutama karena dominasi kendaraan pribadi yang memperparah kemacetan dan polusi.

Tantangan utama Jakarta bukan sekadar pertumbuhan penduduk, melainkan pengelolaan mobilitas manusia secara inklusif dan terintegrasi. Untuk itu, direkomendasikan penguatan administrasi kependudukan yang ramah migran, penyediaan hunian terjangkau berbasis transportasi massal, peningkatan keterampilan tenaga kerja migran, pemanfaatan data real-time, serta penguatan tata kelola kawasan aglomerasi Jabodetabek.

## Pendahuluan

Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang diubah dengan UU No. 21 tahun 2023 yang memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara, di Kalimantan Timur. Posisi Jakarta mengalami transformasi menjadi Daerah Khusus Jakarta. Meskipun tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara, Jakarta tetap memegang peran strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global yang terhubung dengan berbagai jejaring internasional. Status ini menjadikan Jakarta tetap menjadi daya tarik utama bagi arus migrasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Setiap tahun, ribuan penduduk dari berbagai daerah di Indonesia bermigrasi ke Jakarta untuk mencari peluang kerja, pendidikan, dan peningkatan kualitas hidup. Data tahun 2020 sekitar 273 ribu orang masuk Jakarta dari berbagai provinsi (Long Form SP 2020). Selain itu, Jakarta juga menjadi destinasi bagi tenaga kerja asing dan komunitas internasional yang terlibat dalam sektor-sektor strategis. Fenomena migrasi ini memperkaya kehidupan sosial-budaya kota, namun juga memunculkan berbagai tantangan seperti tekanan terhadap infrastruktur, ketimpangan sosial, keterbatasan akses layanan publik, serta kerentanan kelompok migran terhadap eksklusi sosial dan ekonomi.

Dalam upaya memperkuat posisinya sebagai kota global yang inklusif dan berkelanjutan, Jakarta perlu mengelola migrasi secara lebih cermat dan berkeadilan. Pengelolaan migrasi tidak hanya mencakup pengendalian mobilitas penduduk, tetapi juga integrasi sosial, perlindungan hak-hak migran, serta optimalisasi kontribusi mereka terhadap pembangunan kota. Kebijakan yang adaptif dan berbasis data menjadi kunci untuk memastikan bahwa mobilitas manusia menjadi kekuatan, bukan hambatan, dalam perjalanan Jakarta menuju kota global yang setara dan tangguh.

Transformasi status Jakarta menjadi Daerah Khusus (DK) Jakarta melalui Undang-Undang No. 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, membuka ruang bagi perumusan ulang arah pembangunan kota, termasuk dalam pengelolaan migrasi. Di satu sisi, Jakarta tetap menjadi simpul ekonomi nasional dan bagian dari jaringan kota-kota global. Di sisi lain, transisi status ini mendorong kebutuhan akan tata kelola yang lebih otonom, inovatif, dan berbasis tantangan lokal, termasuk dalam menghadapi dinamika mobilitas penduduk. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta adalah pengelolaan migrasi terutama yang masuk Jakarta dan mobilitas tidak menetap (komuter). Sebagai

kota global, Jakarta menjadi kota terbuka yang membuka berbagai *talent* dari berbagai daerah untuk mengembangkan potensinya, namun di sisi lain masih banyak migran dengan pendidikan rendah dan tanpa keterampilan yang menjadi beban bagi Jakarta. *Brief Note* ini menganalisis situasi migrasi di Jakarta dan kaitannya dengan kesiapan sebagai kota global.

## Tren Migrasi Risen Masuk dan Migrasi Risen Keluar

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara. Salah satu bentuk migrasi adalah migrasi risen yaitu perpindahan penduduk yang tempat tinggalnya saat ini berbeda dengan lima tahun yang lalu (Munir, 2010). Indikator ini penting untuk membaca tingkat mobilitas penduduk aktual, bukan sekadar stok migran.

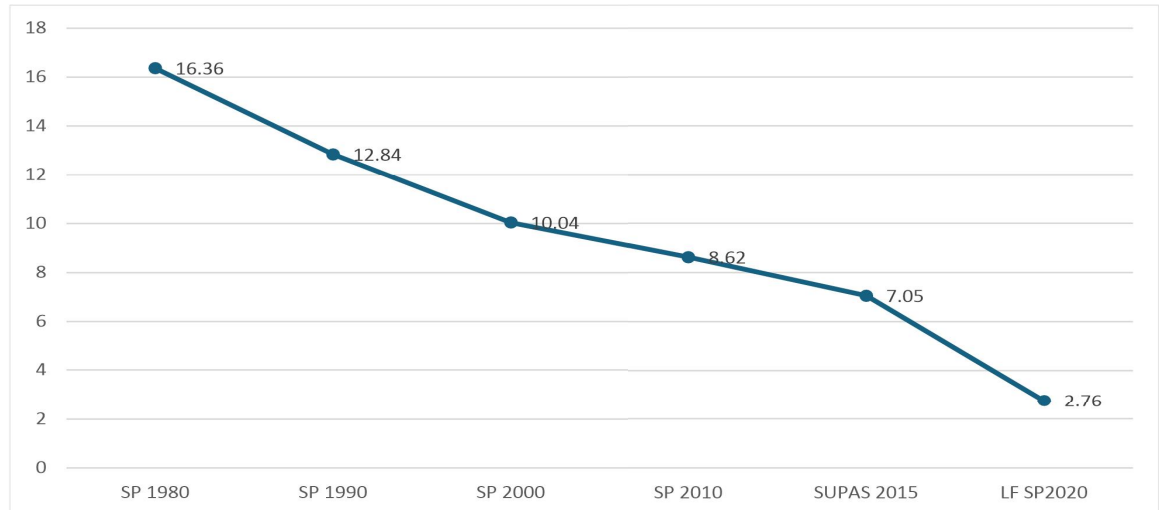
Secara umum, Gambar 1 menunjukkan bahwa persentase migran risen di Jakarta mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam jangka panjang, terutama setelah mencapai puncaknya pada dekade 1980–1990-an. Pada periode awal (1980–1990), proporsi migran risen relatif tinggi, mencerminkan posisi Jakarta sebagai kota tujuan utama migrasi nasional, seiring dengan industrialisasi, ekspansi sektor formal, dan konsentrasi pembangunan ekonomi di ibu kota. Salah satu yang menyebabkan para migran bermigrasi karena sempitnya kesempatan kerja di tempat asal dan rendahnya rata-rata upah/gaji pekerja di tempat asal migran juga merupakan faktor pendorong mereka bermigrasi (BPS, 2004)

“Penurunan persentase migran risen, yang menandakan mulai berkurangnya daya tarik Jakarta sebagai tempat tinggal permanen.”

Memasuki periode 2000–2010, terlihat penurunan persentase migran risen, yang menandakan mulai berkurangnya daya tarik Jakarta sebagai tempat tinggal permanen. Fenomena ini berkaitan dengan meningkatnya tekanan kepadatan penduduk, mahalnya biaya hidup, keterbatasan hunian, serta mulai berkembangnya pusat-pusat ekonomi baru di wilayah penyangga Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Penurunan persentase migrasi risen juga dipengaruhi oleh perubahan struktural ekonomi Jakarta dari basis industri menuju ekonomi jasa dan pengetahuan, yang relatif lebih selektif terhadap tenaga kerja.

Pada periode 2015–2020, persentase migran risen cenderung stagnan atau menurun lebih lanjut, yang dapat diinterpretasikan sebagai pergeseran pola migrasi dari migrasi permanen

**Gambar 1**  
**Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang berstatus migrasi risen, Jakarta, 1980-2020**



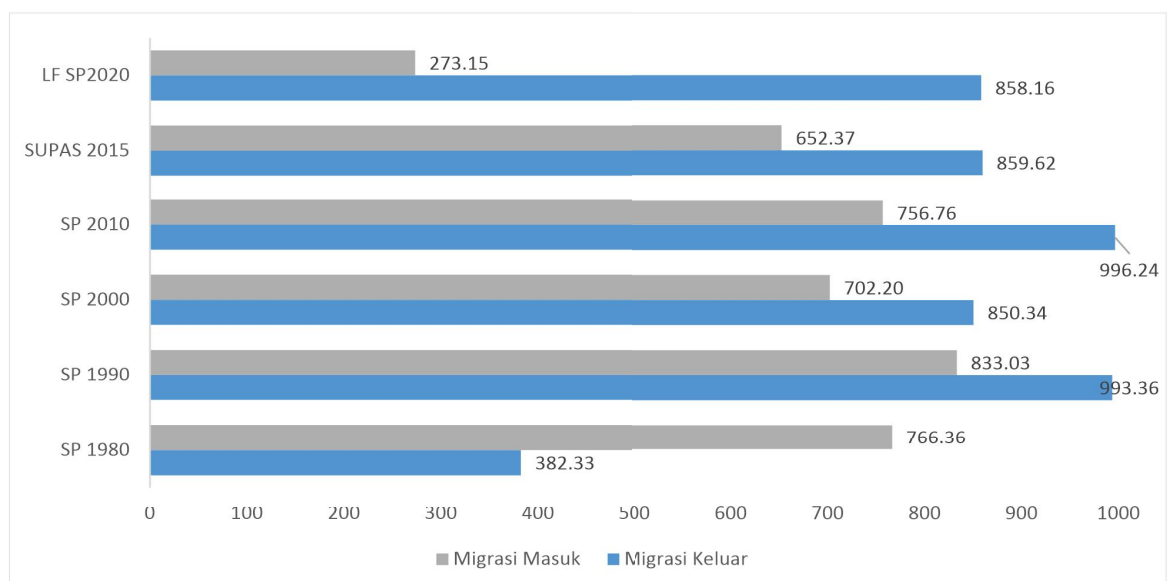
Sumber: BPS (2023)

menuju mobilitas sirkuler dan komuter. Penduduk tetap bekerja atau beraktivitas di Jakarta, namun memilih tinggal di luar wilayah administrasi DKI Jakarta.

Gambar 2 menunjukkan jumlah migrasi risen masuk dan keluar Jakarta selama periode 40

industrialisasi, perluasan sektor manufaktur dan jasa, serta sentralisasi aktivitas pemerintahan dan ekonomi. Pada fase ini, Jakarta mengalami migrasi neto positif yang besar, yang berkontribusi pada pertumbuhan penduduk pesat dan peningkatan kebutuhan perumahan serta layanan dasar.

**Gambar 2**  
**Jumlah migrasi masuk risen dan migrasi risen keluar di Jakarta, 1980-2020 (ribu orang)**



Sumber: BPS (2023)

tahun. Berbeda dengan persentase, indikator ini menekankan skala dan intensitas arus migrasi, sehingga penting untuk memahami tekanan demografis riil terhadap Jakarta.

Pada periode 1980-1990, jumlah migrasi masuk risen jauh lebih tinggi dibanding migrasi keluar. Kondisi ini mencerminkan Jakarta sebagai magnet utama migrasi nasional, didorong oleh

“Kondisi ini mencerminkan Jakarta sebagai magnet utama migrasi nasional, didorong oleh industrialisasi, perluasan sektor manufaktur dan jasa,”

Memasuki era 2000-an, terlihat penurunan migrasi masuk dan secara bersamaan peningkatan migrasi keluar. Selisih antara keduanya semakin menyempit. Fenomena ini menandai awal desentralisasi demografis, di mana sebagian penduduk memilih keluar dari Jakarta akibat meningkatnya kepadatan, kemacetan, mahalnya biaya hidup, serta keterbatasan akses hunian layak. Pada periode ini pula, wilayah penyangga Jabodetabek berkembang pesat sebagai alternatif tempat tinggal, sehingga migrasi keluar tidak selalu

berarti pelemahan ekonomi Jakarta, melainkan perubahan pola hunian.

Pada periode 2015-2020, jumlah migrasi masuk dan keluar cenderung berimbang, bahkan pada beberapa titik migrasi keluar mendekati atau menyamai migrasi masuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jakarta telah memasuki fase migrasi sirkuler, di mana arus masuk masih terjadi namun diimbangi oleh arus keluar yang signifikan. Migrasi sirkuler adalah perpindahan seseorang yang tidak untuk menetap, karena masih memiliki keluarga di tempat asal (Munir, 2010).

Tabel 1 menunjukkan arus migrasi masuk dan keluar Jakarta dari dan ke wilayah penyangga

asal setelah bekerja di Jakarta. Para migran kembali membawa sumber daya keuangan, keterampilan, dan pengetahuan yang dapat mendorong pembangunan ekonomi (Wahba, 2026). Sementara itu, migrasi ke Banten mencerminkan perluasan kawasan industri dan permukiman baru di wilayah barat Jakarta.

Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama Jakarta bukan sekadar pertumbuhan penduduk, melainkan pengelolaan mobilitas harian dan sirkulasi migran (komuter). Tanpa integrasi kebijakan lintas wilayah, tekanan terhadap transportasi, perumahan, dan layanan publik akan terus meningkat.

Arus migrasi masuk memberikan kontribusi

**Tabel 1**  
**Jumlah dan persentase migran masuk dan migran keluar dari dan ke wilayah penyangga Jakarta, 2020**

| Kab/Kota Penyangga     | Migrasi masuk (ribu) | Persentase | Migrasi Keluar (ribu) | Persentase |
|------------------------|----------------------|------------|-----------------------|------------|
| Kab Bogor              | 186,73               | 19,63      | 68,60                 | 7,99       |
| Kab Bekasi             | 201,26               | 21,16      | 65,98                 | 7,69       |
| Kota Bogor             | 31,80                | 3,34       | 7,32                  | 0,85       |
| Kota Depok             | 159,18               | 16,74      | 85,77                 | 9,99       |
| Kotas Bekasi           | 111,45               | 11,72      | 49,62                 | 5,78       |
| Kab Tangerang          | 131,69               | 13,85      | 36,20                 | 4,22       |
| Kota Tangerang         | 65,70                | 6,91       | 26,31                 | 3,07       |
| Kota Tangerang Selatan | 63,28                | 6,65       | 30,21                 | 3,52       |
| Lainnya                | -                    | -          | 488,15                | 56,88      |
| Total                  | 951,09               | 100        | 858,16                | 100        |

Sumber: BPS (2023)

utama (Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang). Kabupaten Bekasi (21,16%) dan Kabupaten Bogor (19,63%) menjadi sumber terbesar migrasi masuk ke Jakarta. Hal ini mencerminkan kuatnya mobilitas penduduk kawasan industri dan permukiman menuju Jakarta, terutama untuk keperluan kerja dan pendidikan.

Lebih dari setengah migrasi keluar Jakarta (56,88%) menuju kategori "lainnya", yang

"Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan utama Jakarta bukan sekadar pertumbuhan penduduk, melainkan pengelolaan mobilitas harian dan sirkulasi migran (komuter)."

menunjukkan bahwa penduduk Jakarta tidak hanya pindah ke wilayah penyangga, tetapi juga ke provinsi lain di luar Jabodetabek. Ini mengindikasikan penurunan daya tarik Jakarta sebagai tempat tinggal permanen, meskipun tetap kuat sebagai pusat kerja. Yang termasuk wilayah lain misalnya Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Migrasi ke Jawa Tengah mengindikasikan *return migration* (migrasi kembali), khususnya bagi penduduk usia produktif atau lanjut usia yang kembali ke daerah

positif terhadap ketersediaan tenaga kerja dan dinamika ekonomi Jakarta termasuk berkembangnya sektor informal yang menyerap banyak tenaga kerja (World Bank, 2020; BPS, 2004). Namun, dampak negatif juga semakin nyata, antara lain meningkatnya permukiman tidak layak, kemacetan lalu lintas, polusi udara, serta tekanan pada pasar kerja yang tercermin dalam pengangguran dan setengah pengangguran (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2024).

## Komuter

Selain migrasi, komuter merupakan fenomena yang dialami penduduk Jakarta dan sekitarnya. Dalam konteks kawasan Jabodetabek, komuter adalah penduduk yang bertempat tinggal di satu wilayah administratif di kawasan Jabodetabek, namun secara rutin melakukan perjalanan lintas wilayah (harian atau hampir setiap hari) untuk bekerja, bersekolah, atau melakukan aktivitas ekonomi dan sosial utama di wilayah lain, terutama menuju Jakarta sebagai pusat kegiatan. Mobilitas komuter umumnya bersifat tidak permanen, tanpa perubahan status

tempat tinggal, dan sangat dipengaruhi oleh keterkaitan fungsional antarwilayah, sistem transportasi massal, serta perbedaan biaya hidup dan ketersediaan lapangan kerja antara Jakarta dan daerah penyangga.

Berdasarkan Survei Komuter Jabodetabek 2023 yang dilakukan oleh BPS, sebanyak 14,9 persen penduduk dari 29,6 juta penduduk Jabodetabek melakukan perjalanan ulang alik (komuter) dari rumah ke tempat kerja. Persentase komuter tertinggi adalah penduduk dari Kota Depok (24,5 persen) disusul kota Bekasi (19,2 persen) dan kota Tangerang Selatan (18,5 persen). Persentase komuter dibandingkan jumlah penduduk. Sementara itu, Kabupaten Tangerang memiliki persentase komuter terendah (9,0 persen).

Sebagian besar komuter (72,0 persen) di Jabodetabek berada di kelompok umur yang produktif (15–44 tahun), 16,4 persen berumur antara 45–54 tahun, dan hanya 6,5 persen yang berumur 55 tahun ke atas. Dari segi pendidikan, tingkat pendidikan komuter adalah di Jabodetabek adalah SMA/ sederajat (48,8 persen) dan tamatan perguruan tinggi sebesar 31,3 persen. Moda transportasi utama yang paling banyak digunakan untuk pergi dan pulang ke/ dari tempat kegiatan adalah kendaraan pribadi yang mencakup sepeda motor dan mobil (79,5 persen). Sementara itu, sebanyak 19,5 persen komuter menggunakan kendaraan umum untuk pergi ke tempat kegiatan. Fenomena migrasi dan komuter ini menjadi tantangan Pemerintah Jakarta menuju Kota Global.

## Tantangan Mengelola Migrasi di Jakarta Menuju Kota Global

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menegaskan reposisi Jakarta dari sekadar ibu kota negara menjadi Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global dengan peran strategis sebagai pusat perdagangan, pusat layanan jasa dan jasa keuangan, serta pusat aktivitas bisnis tingkat nasional, regional, dan global. Dalam kerangka kota global, sebagaimana diperkenalkan Saskia Sassen (1991), daya saing suatu kota tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, melainkan juga oleh kapasitasnya mengelola arus manusia, modal, informasi, dan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.

Berdasarkan *Global Power City Index* tahun 2025 yang dikembangkan oleh Mori Foundation<sup>1</sup>, Jakarta menempati peringkat ke-45 dari 48 kota, tertinggal jauh dari kota-kota global mapan seperti London, New York, dan Tokyo, Seoul serta dari Singapura di kawasan

Asia Tenggara. Indeks tersebut menilai enam fungsi utama kota, yaitu ekonomi, riset dan pengembangan, interaksi budaya, tingkat kelayakhunian (*livability*), lingkungan hidup, dan aksesibilitas. Posisi Jakarta dalam indeks tersebut mencerminkan masih besarnya tantangan struktural, antara lain kepadatan dan mobilitas penduduk yang tinggi, keberadaan tenaga kerja berkeahlian rendah (*unskilled labor*), permukiman kumuh, kemacetan, polusi udara, kerentanan terhadap perubahan iklim (termasuk *urban heat island*), banjir, rob dan penurunan tanah, pengelolaan persampahan, serta keterbatasan akses air bersih. Seluruh tantangan ini berkaitan erat dengan dinamika dan pengendalian penduduk, serta menentukan tingkat kelayakhunian Jakarta sebagai kota global di masa depan.

“Kota global pada dasarnya ditandai oleh keterbukaan dan kemampuan menyerap mobilitas manusia”

Kota global pada dasarnya ditandai oleh keterbukaan dan kemampuan menyerap mobilitas manusia—baik pekerja berkeahlian tinggi, migran internal berkeahlian menengah hingga rendah, maupun pekerja informal yang mengisi ruang ekonomi yang sebelumnya tidak tersentuh.

Migran yang datang ke Jakarta mayoritas berusia produktif, dengan hampir tujuh puluh persen berada pada rentang usia lima belas hingga tiga puluh sembilan tahun. Sebagian besar memiliki pendidikan menengah, terutama lulusan SMA atau SMK, yang berfokus pada pencarian pekerjaan (BPS, 2023). Migrasi yang didominasi kelompok usia produktif ini sebenarnya merupakan aset yang sangat besar.

Namun potensi tersebut seringkali berhadapan dengan tantangan struktural. Infrastruktur kota harus menghadapi tekanan besar akibat pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan perluasan ruang dan kapasitas layanan. Jakarta bahkan menjadi kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Asia Tenggara, mencapai 16.155 orang per kilometer persegi. Di kawasan tertentu seperti Johar Baru, Penjaringan, dan Cengkareng, kepadatan jauh melebihi batas rata-rata kota layak huni menurut standar internasional. Dorongan akan kebutuhan hunian membuat harga rumah naik setiap tahun sementara pembangunan hunian terjangkau tidak mampu menutup kesenjangan pasokan. Migran muda dan pekerja informal akhirnya banyak menghuni kawasan kumuh, rumah petak, atau kos yang tidak layak huni.

Di sisi lain, pasar kerja Jakarta juga tidak sepenuhnya inklusif bagi para migran. Mereka yang berpendidikan rendah atau tidak memiliki keterampilan yang sesuai umumnya masuk ke

1. The Global Power City Index (GPCI), <https://mori-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml>

sektor informal. Sektor ini meliputi pedagang kaki lima, pekerja restoran kecil, petugas kebersihan informal, pekerja rumahan, hingga pengemudi transportasi daring. Meski mudah untuk bekerja di sektor informal, namun sektor ini sering kali tidak menjamin stabilitas pendapatan, jam kerja yang manusiawi, dan perlindungan sosial. Hal ini menyebabkan sebagian migran terus berada dalam kerentanan ekonomi meskipun tinggal di pusat perekonomian terbesar Indonesia.

Selain itu, migran baru menghadapi hambatan administratif untuk mendapatkan layanan dasar. Akses pendidikan bagi anak migran bisa terhambat karena memprioritaskan penduduk ber-KTP Jakarta atau migran yang sudah memiliki KTP Jakarta (Awaludin, 2023). Layanan kesehatan pun tidak selalu dapat diakses karena status BPJS Kesehatan migran sering tidak aktif atau belum diperbarui saat berpindah alamat. Permasalahan administrasi kependudukan ini semakin kompleks karena banyak migran tinggal di rumah kontrakan atau kos yang tidak memungkinkan mereka memperoleh surat tempat tinggal resmi. Kondisi tersebut menciptakan lingkaran hambatan yang berkepanjangan bagi migran untuk berintegrasi secara penuh ke dalam sistem pelayanan publik kota.

“Jika dikelola dengan baik, migrasi dapat memperkuat transformasi Jakarta menuju kota global yang dinamis. Kota-kota seperti Singapura, London, Tokyo, dan New York secara historis berkembang karena kemampuan mereka menyerap pekerja migran”

Dalam konteks kawasan, tantangan migrasi di Jakarta tidak dapat dipisahkan dari dinamika Jabodetabek. Jumlah penduduk yang melakukan mobilitas ulang alik (komuter) sekitar 4,4 juta, berdasarkan Survei Komuter tahun 2023 oleh BPS, di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Namun perencanaan tata ruang, infrastruktur transportasi, dan kebijakan layanan publik masih berjalan secara sektoral tanpa koordinasi terpadu. Akibatnya, arus migrasi dan mobilitas penduduk menimbulkan kemacetan parah, tekanan lingkungan, dan ketidaksinkronan pembangunan antara pusat kota dan daerah penyangga.

Walaupun demikian, migrasi tetap membuka peluang besar bagi Jakarta. Jika dikelola dengan baik, migrasi dapat memperkuat transformasi Jakarta menuju kota global yang dinamis. Kota-kota seperti Singapura, London, Tokyo, dan New York secara historis berkembang karena kemampuan mereka menyerap pekerja migran dalam jumlah besar, memanfaatkan keberagaman untuk memacu inovasi, serta menjadikan migrasi sebagai energi pembangunan. Jakarta dapat mengambil pelajaran serupa dengan memastikan migrasi menjadi kekuatan ekonomi, sosial, dan budaya.

## Rekomendasi Kebijakan

Dengan melihat tantangan yang dihadapi Jakarta, kebijakan migrasi Jakarta perlu diarahkan pada penguatan sistem administrasi kependudukan yang lebih ramah migran, pembangunan hunian terjangkau yang terintegrasi dengan transportasi massal, penguatan kapasitas tenaga kerja melalui pelatihan cepat dan khusus, serta integrasi tata kelola mobilitas kawasan Jabodetabek. Reformasi layanan pindah domisili dan administrasi kependudukan merupakan langkah awal untuk memastikan setiap pendatang dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar tanpa hambatan birokrasi. Digitalisasi layanan, sistem identitas tunggal yang terintegrasi, serta pusat informasi migran dapat mengurangi kesenjangan informasi dan mendukung integrasi sosial pendatang baru.

Dalam aspek perumahan, kebijakan hunian terjangkau berbasis kawasan berorientasi transit (TOD) menjadi salah satu solusi efektif. Migran muda dan pekerja informal perlu mendapatkan akses pada hunian yang layak dan dekat dengan pusat aktivitas ekonomi sehingga tidak harus tinggal di kawasan kumuh atau jauh dari tempat kerja. Revitalisasi kawasan kumuh berbasis komunitas juga perlu diperkuat untuk memastikan bahwa peningkatan kualitas hunian tidak menimbulkan penggusuran dan disrupsi sosial.

Pada sektor tenaga kerja, pemerintah dapat meluncurkan program peningkatan keterampilan yang dirancang khusus untuk karakteristik migran muda. Program pelatihan untuk sektor-sektor yang berkembang pesat seperti logistik digital, perhotelan, *green jobs*, teknologi informasi, dan jasa perawatan kesehatan dapat meningkatkan kemampuan migran memperoleh pekerjaan formal atau meningkatkan pendapatan usaha kecil mereka. Namun, saat ini kebijakan Pemerintah Jakarta untuk pelatihan dan bantuan sosial diprioritaskan bagi penduduk yang memiliki KTP Jakarta dan tinggal di Jakarta. Di sini peran pemerintah pusat diperlukan agar pekerja migran mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya.

Salah satu elemen kunci dalam pengelolaan migrasi modern adalah ketersediaan *data real-time*. Jakarta perlu membangun sistem observasi migrasi berbasis *big data*, yang mengintegrasikan informasi dari Dukcapil, perusahaan transportasi, operator telekomunikasi, rumah sakit, dan sekolah. Data ini dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih akurat, termasuk proyeksi kebutuhan perumahan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.

Untuk menghadapi kompleksitas migrasi dan mobilitas kawasan, perlu dibentuk sebuah otoritas bersama yang dapat mengoordinasikan kebijakan lintas daerah dalam lingkup *Greater Jakarta* (Kawasan Aglomerasi). Otoritas ini dapat mengintegrasikan transportasi massal, perencanaan tata ruang, dan kebijakan perumahan lintas kota-kabupaten sehingga migrasi dan mobilitas dapat dikelola secara efektif sebagai satu kesatuan metropolitan. Dalam UU No. 2 tahun 2024, pemerintah membentuk Dewan Kawasan Aglomerasi yang bertugas untuk:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi, dan
- b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Jakarta dapat memastikan bahwa migrasi dan komuter bukan menjadi beban melainkan peluang. Migrasi dapat menjadi energi bagi transformasi kota menuju pusat pertumbuhan global, dengan syarat bahwa tata kelola migrasi dilakukan secara inklusif, berbasis data, dan berpihak pada peningkatan kualitas hidup pendatang dan warga lama. Keberhasilan Jakarta sebagai kota global akan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengelola keragaman, memaksimalkan potensi migran, dan menciptakan ruang kota yang layak huni bagi seluruh kelompok masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Awaludin, B. (2023). Pentingnya Pencatatan Penduduk sesuai dengan Domisili. Paparan disampaikan pada Seminar Kebijakan Penonaktifan Sementara NIK dan Pengaktifan Kembali NIK di Universitas Indonesia, 16 November 2023.
- BPS. (2004). Penelitian Dampak Migrasi di Jakarta. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- BPS. (2023). Analisis Tematik Kependudukan Provinsi DKI Jakarta: Potret Fertilitas, Mortalitas, dan Migrasi Penduduk Jakarta, 2023
- BPS. (2024). Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2023. Vol. 3, 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2024. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Munir, Rozy. (2010). Migrasi, dalam Dasar-Dasar Demografi, SM Adioetomo, OB Samosir (Editor). Jakarta: Salemba Empat.
- Sassen, S. (1991) 'The global City. New York, London, Tokyo', *The Global City: New York, London, Tokyo*, 107. doi: 10.2307/2152688.
- Wahba, J. (2026). "Return migration and economic development: opportunities and challenges", *World Development*, Vol. 198, Feb 2026.
- World Bank. (2020). *Managing Indonesia's Urbanization*. Washington, DC: World Bank.